

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN
TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten
Tanah Datar)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

FAHRUL RIZKY

1805046009

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdra. Fahrul Rizky

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Fahrul Rizky
NIM : 1805046009
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **PENGARUH AKUNTABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Sumpur Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar)**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2022

Pembimbing I



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II



Firdha Rahmiyanti, M.A.
NIP. 199103162019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp./Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar).**
Penulis : **Fahrul Rizky**
NIM : **1805046009**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah diujikan dalam sidang *munagasyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

22 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Naili Saadah, SE., M.Si., Ak.
NIP. 198803312019032012

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji Utama I,

Fajar Adhitya, S. Pd., MM.
NIP. 198910092015031003

Penguji Utama II,

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Pembimbing I,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II,

Firdha Rahmivanti, M.A.
NIP. 199103162019032018



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan penulis banyak kekuatan dan kesabaran, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa pula shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW untuk menantikan syafaat di hari akhir kelak. Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, dukungan dan bimbingan kepada Saya, dan menjadi motivasi Saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberi keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Kelima kakak-kakak ku, yang telah menjadi support system dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
3. Untuk Partner hidupku Nur Rahmi Ilahi yang telah setia memberikan Do’a, dukungan, semangat, bantuan, dan dorongan penuhnya sehingga bisa sampai dititik ini.
4. Sahabat, rekan, dan teman-teman yang tak bisa Saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan banyak dukungan, bantuan serta inspirasi kepada Saya dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung Saya selama perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir ini senantiasa dilindungi Allah dan menjadi orang yang sukses nantinya.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, terima kasih telah menghadirkan dosen, pegawai dan teman-teman yang baik di bangku perkuliahan kepada Saya. Semoga kelak menjadi universitas dengan riset terdepan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Rizky

NIM : 1805046009

Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)" adalah hasil penelitian sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022,



Fahrul Rizky

1805046009

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = „	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a

اِ - = i

اُ - = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ˆ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبة = al-thibb.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang ال ... () ditulis dengan al-.... misalnya الصناعة = al-shina ‘ah.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = al-

ma‘isyah al-thabi‘iyyah.

ABSTRAK

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip *good governance*. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya dikatakan efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Nagari Sumpur yang berumur 17 keatas atau sudah mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 96. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *proportional random sampling*. Pengujian data menggunakan SPSS versi 23. Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,228 > 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,028 > 0,1$. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,786 < 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,434 > 0,1$. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,388 > 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Serta ketiga variabel yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $49,087 > 2,14$ dan juga nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,1$.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

Community participation, transparency, and accountability are needed in managing village funds based on the principles of good governance. If village funds are used according to their priorities, then the management of the funds is said to be effective so that these funds can be used and distributed in order to achieve the goals that have been set. The sample of this study was the Nagari Sumpur people who were 17 years old or above or already had the right to vote with a sample of 96. The type of research is quantitative and the sampling technique is carried out by *proportional random sampling*. Data testing using SPSS version 23. The results of the analysis show that accountability has a positive and significant effect on village fund management with a calculation greater than t table, namely $2,228 > 1,662$ with a significance value of $0.028 < 0.1$. Community participation has a negative and insignificant effect on village fund management because the calculation is smaller than the table t, which is $-0.786 < 1.662$ with a significance value of $0.434 > 0.1$. Transparency has a positive and significant effect on village fund management with a calculation greater than t table, namely $6,388 > 1,662$ with a significance value of $0.000 < 0.1$. As well as the three variables, namely accountability, community participation and transparency simultaneously affect the management of village funds, this is indicated by a calculated F value greater than the table F value of $49,087 > 2.14$ and also a significance value of 0.000 which is smaller than 0.1 .

Keywords: Accountability, Community Participation, Transparency, Village Fund Management.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Firdha Rahmiyanti, M.A selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas.
6. Seluruh teman-teman yang ikut serta membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis selama di perkuliahan. Tak lupa kepada keluarga besar AKS A angkatan 2018.

7. Seluruh dosen pengajar beserta karyawan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama kuliah.

Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 Desember 2022



Fahrul Rizky

1805046009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Stewardship	10
2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory).....	11
2.1.3 Akuntabilitas.....	11
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	15
2.1.5 Transparansi.....	20
2.1.6 Dana Desa.....	24
2.1.7 Pengelolaan Dana Desa	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik	31

2.4 Hipotesis Penelitian	31
2.4.1 Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	32
2.4.2 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa	32
2.4.3 Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Sumber Data	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	38
3.5 Teknik Analisa Data.....	42
3.5.1 Uji Keabsahan Data	42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.3 Uji Statistik	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Nagari Sumpur	47
4.1.2 Struktur Organisasi	49
4.1.3 Deskriptif Data Penelitian.....	50
4.2 Karakteristik Responden	50
4.2.1 Jenis Kelamin.....	50
4.2.2 Usia	51
4.2.3 Pekerjaan.....	52
4.3 Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Uji Keabsahan Data	53
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.3.3 Uji Statistik	60
4.4 Pembahasan	66
4.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar	66
4.4.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar	67

4.4.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	28
Tabel 3. 1	38
Tabel 4. 1	49
Tabel 4. 2	51
Tabel 4. 3	51
Tabel 4. 4	52
Tabel 4. 5	53
Tabel 4. 6	54
Tabel 4. 7	54
Tabel 4. 8	55
Tabel 4. 9	56
Tabel 4. 10	57
Tabel 4. 11	58
Tabel 4. 12	59
Tabel 4. 13	60
Tabel 4. 14	61
Tabel 4. 15	63
Tabel 4. 16	64
Tabel 4. 17	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pernyataan Kuesioner
2. Daftar Karakteristik Responden
3. Tabulasi Hasil Jawaban Responden
4. Hasil Uji Validitas
5. Hasil Uji Reliabilitas
6. Hasil Uji Normalitas
7. Hasil Uji Multikolinieritas
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
11. Hasil Uji F
12. Hasil Uji t
13. Daftar Riwayat Hidup
14. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia berusaha mencapai tujuan nasional melalui pengadaan pembangunan nasional dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang mengutamakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai UUD 1945 dan Pancasila seperti saat ini. Upaya pembangunan terus dilakukan di seluruh wilayah desa maupun kota. Kewenangan dan peraturan sebuah desa secara struktural telah tercantum dan diatur pada UU No.60 Tahun 2014. UU tersebut mencantumkan mengenai APDB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai sumber anggaran desa.¹

Pemerintah berharap adanya kesinambungan dan kelancaran dalam pengelolaan dana desa harus dimulai dari wilayah nagari atau perdesaan. Sekumpulan masyarakat hukum dengan batasan wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri disebut nagari. Dasar dari kepentingan masyarakatnya adalah hak tradisional, hak asal usul dan prakarsa masyarakat yang dihormati serta diakui oleh sistem pemerintahan NKRI. UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakatnya, nagari diberi kewenangan untuk menjalankan dan mengatur potensi yang dimilikinya sendiri.²

Tata kelola pemerintahan bisa terlaksana dengan baik karena adanya peran dari akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan publik baik di desa, daerah maupun di pusat pemerintahan. Melalui buku berjudul Akuntansi Sektor publik karyanya, Muindro menyebutkan terdapat 3 pilar utama dalam

¹ Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, Cet. 1. (Jakarta: Visimedia, 2016).

² Elmi Zulsrianti, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017*, *Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah* (IAIN Batusangkar, 2019).

good governance yakni partisipatif, akuntabilitas, serta transparansi.³ Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu Akuntabilitas kebijakan mengenai pertanggung jawaban berbagai kebijakan yang pemerintah daerah dan pusat ambil kepada masyarakatnya. Kebijakan tersebut terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.⁴

Tercapainya tujuan harus dijadikan pertimbangan utama dalam pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya dikatakan efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan sesuai rencana waktu yang sudah ditetapkan, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai manfaatnya, dan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat tersebut melalui program-program tertentu.⁵

Sebuah kewajiban memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan dan menjawab kinerja seorang individu, pimpinan, atau badan hukum kepada pihak yang berwenang dan berhak untuk meminta atau menerimanya disebut akuntabilitas.⁶ Peran serta atau partisipasi masyarakat secara umum diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.⁷ Sebuah prinsip keterbukaan yang membuat manusia mampu mendapatkan dan mengetahui akses informasi secara luas mengenai keuangan daerah disebut transparansi. Berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan seperti hasil capaian suatu kegiatan, proses

³ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

⁴ Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, and Early Ridho Kismawadi, Praktik Akuntabilitas Masjid : Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya 9 (2018): 207–231.

⁵ I Made Yoga Darma Putra and Ni Ketut Rasmini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 1 (2019): 132.

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Makasar: Graha Ilmu, 2011).

⁷ Leni Ariningsih, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana), *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen* (2021): 19.

pelaksanaan, pembuatan, dan kebijakan-kebijakan tertentu bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat melalui transparansi ini.⁸

Dasar dari akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan suatu hal kepada pemberinya. Tidak hanya akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal juga ditekankan dalam akuntabilitas publik. Masyarakat bertindak partisipatif atau melibatkan diri secara tidak langsung maupun langsung dalam penyaluran aspirasi bagi pengambilan keputusan melalui sebuah lembaga perwakilan. Dasar dari partisipasi ini ialah kebebasan berpartisipasi secara konstruktif, berbicara, dan berasosiasi. Setiap orang yang membutuhkan informasi bisa mendapatkannya melalui transparansi yang membebaskan publik untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam transparansi publik tersebut.⁹

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip *good governance* agar para aparat desa menunjukkan perilaku sesuai peraturan hukum dan etika yang ada dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kewajiban atas sumber daya publik pada pihak yang berwenang atau pemberi tanggung jawab tersebut. Berbagai hal buruk dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, misalnya penyalahgunaan dana desa dan wewenang, serta salah paham antara masyarakat dengan aparat pemerintah.¹⁰

Penyelenggaraan keuangan desa awalnya diatur dalam Permen dalam Negeri No.113 Tahun 2014 kemudian diubah ke dalam Permen dalam Negeri no.20 Tahun 2018. Khusus untuk Kabupaten Tanah Datar diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Datar No.11 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Dijelaskan dengan tegas pada Pasal 2 ayat 1

⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014.

⁹ Putra and Rasmini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

¹⁰ Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih, and Siti Alliyah, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 01 (2022).

bahwa keuangan dalam nagari harus dikelola sesuai peraturan UU, transparan, dengan sebaik-baiknya, dan secara bertanggung jawab agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya. Namun masih saja ditemukan penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan keuangan di lapangan¹¹. Menurut data dari ICW diketahui bahwa tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa oleh para APH (aparatus penegak hukum) yang diperkirakan senilai 233 miliar rupiah¹².

Kasus di 3 nagari di Kabupaten Tanah Datar yakni Minangkabau Kecamatan Sungayang Sumanik Kecamatan Salimpaung, Koto Baru Kecamatan X Koto merupakan salah satu dari ratusan kasus penyalahgunaan keuangan nagari di Indonesia. Kasus tersebut berupa terganggunya proses pencairan dana tahap I di 3 nagari yang mengakibatkan 72 nagari lainnya terhambat menerima pencairan dana tahap II. Minimnya transparansi laporan keuangan dari ketiganya menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan penyaluran dana nagari, diperlukan laporan pengajuan baik berbentuk fisik maupun keuangan kepada pemerintahan pusat.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022. Nagari atau Desa Sumpur menjadi salah satu desa penerima pendapatan pemerintah yang berasal dari APBD dan APBN. Rencana kerja pemerintah Nagari Sumpur dimulai dari perencanaan yang diawali dengan musyawarah dengan masyarakat di tingkat jorong atau RT dan hasil yang dapat

¹¹ Khairani, Perbedaan Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Tanah Datar, *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019).

¹² Vika Azkiya, ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa Pada 2021, *Databoks*, last modified 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor \(2021\)&text=Indonesia Corruption Watch \(ICW\) menemukan,kerugian negara sebesar Rp233.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2021)&text=Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan,kerugian negara sebesar Rp233.)

¹³ Khairani, Perbedaan Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Tanah Datar.

akan di musyawarahkan lagi dengan masyarakat di tingkat nagari dan terakhir musyawarah oleh tim musyawarah rembuk nagari (Musrembung) yang akan di ambil 2-3 kegiatan yang merupakan prioritas. Selanjutnya, kegiatan yang menjadi prioritas akan dilaksanakan survey dan dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh perencana atau kader teknis. Pelaksanaan, yaitu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang bertugas merancang anggaran biaya dari usulan kegiatan yang diajukan, setelah itu ada SK kegitan yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). TPK yang dibentuk oleh PTPKN yang terdiri dari masyarakat di Nagari Sumpur, TPK yang bertugas mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan dan juga bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan, yaitu TPK bertanggung jawab kepada PTPKN di bidang pelaksanaan kegiatan akan melaporkan laporan realisasi terhadap penggunaan dana kepada bendahara nagari. Pelaporan dan pertanggung jawaban, yaitu TPK bertanggung jawab memberikan laporan kepada PTPKN, selanjutnya PTPKN melaporkan kepada bendahara nagari dan bendahara nagari memberikan laporan kepada Wali Nagari untuk melanjutkan laporan kepada tim verifikasi kecamatan dan terakhir laporan dilanjutkan kepada kabupaten (ekspetorat).¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022, bahwa Nagari Sumpur telah memakai APBN berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Untuk kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu di bagian perencanaan setelah usulan didapatkan dan sudah dilanjutkan ke RAB dan surat izin bebas lahan sudah didapatkan, namun yang terjadi saat pelaksanaan terjadi kendala dimana lahan yang sudah diberi izin ditarik kembali oleh pemilik lahan. Penggunaan teknologi informasi berupa jaringan internet dan perangkat keras serta lunak lain menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan akuntabilitas. Proses

¹⁴ Kantor Wali Nagari Sumpur, 2022.

penyusunan laporan keuangan di desa dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui ketersediaan alat komputer di setiap desa. Kesalahan penyusunan juga bisa diminimalisir melalui penggunaan teknologi tersebut sehingga hasilnya menjadi lebih akuntabel. Kendala dalam partisipasi masyarakat adalah minimnya kerjasama atau partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran mengenai kerjasama membangun desa yang kurang serta kesibukan masing-masing orang sehingga terjadi ketidakefektifan berbagai program desa. Untuk kendala yang terjadi dalam transparansi adalah penyampaian informasi yang diberikan baru berupa spanduk yang hanya di pasang di kantor wali nagari dan di lokasi kegiatan untuk website resmi dari kantor wali nagari belum tersedia. Banyak nagari di Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki website resminya namun ada sebagian juga yang masih belum salah satunya adalah Nagari Sumpur, di Nagari Sumpur untuk pembuatan website resmi sebenarnya sudah di rencanakan untuk surat pengajuannya sudah di kirimkan ke kominfo namun masih belum ada respon sampai sekarang.¹⁵

Dari penelitian terdahulu Putra dan Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.¹⁶ Hal tersebut sejalan dengan riset dari Prihasantyo Siswo Nugroho, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, didapati hasil bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹⁷ Dan penelitian Nada Salsabila Ramadhani, Anik Yuliat

¹⁵ Kantor Wali Nagari Sumpur.

¹⁶ Putra and Rasmini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

¹⁷ Nugroho, Wahyuningsih, and Alliyah, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

(2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.¹⁸

Perbedaan penelitian yang peneliti teliti ini dengan beberapa penelitian tersebut ialah teknik pengambilan sampelnya. Peneliti terdahulu memakai purposive sampling dalam pengambilan sampelnya dengan menentukan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan peneliti disini menggunakan *proportional random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.

Dalam pengelolaan dana nagari, Nagari Sumpur mendapatkan penerimaan dana yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, dimana anggaran di setiap tahun dari 2017-2021 secara berurutan bernilai Rp.796.788.000, Rp.695.723.000, Rp.825.247.000, Rp.763.099.000, dan Rp.784.638.000. Terjadi penurunan yang lumayan jauh pada 2018 namun meningkat lagi pada 2019.¹⁹

Pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur berupa pemberdayaan masyarakat, sumber daya dan pengelolaan dana nagari tidak akan terjadi penyimpangan atau hal yang dapat merugikan apabila dikelola dengan tepat dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Menurut uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam permasalahan tersebut melalui karya ilmiah skripsi berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa”**

¹⁸ Nada Salsabila Ramadhani and Anik Yuliati, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021).

¹⁹ Kantor Wali Nagari Sumpur, *Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Nagari Sumpur*, n.d.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur?
3. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan terkait akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi serta pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.
2. Referensi acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Menyajikan informasi tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

BAB I menguraikan beberapa subbab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Penulis akan memberikan penjelasan teori tentang grand teori, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dana desa, pengelolaan dana desa, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini secara terperinci akan dijelaskan jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, deskripsi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa hal umum terkait Nagari Sumpur, karakteristik responden, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan pembahasan serta saran untuk pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori “*Toward a Stewardship Theory of Management*” yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menunjukkan bahwa teori *stewardship* sebagai keadaan di mana para pelaku manajemen lebih mengutamakan kepentingan bersama/organisasi dibanding keinginan pribadi dalam mengelola manajemen. Terdapat dasar sosiologi dan psikologi yang para eksekutif organisasi/perusahaan rancang dalam teori ini bahwa mereka harus memotivasi diri dalam bertindak dan melayani masyarakat maupun pemerintah sesuai keinginannya dengan pelayanan terbaik. Asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat keterikatan yang kuat antara kepuasan dengan kesuksesan organisasi yang menunjukkan tujuannya yang terwujud dengan maksimal. Teori ini lebih tepat dipakai dalam instansi pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan melayani kepentingan masyarakat, bukan yang memiliki orientasi pada keuntungan.²⁰

Teori steward (pemerintah desa) menegaskan bahwa stewards atau pemerintah desa menjadi sebuah lembaga yang bertindak dan dipercayai masyarakat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang berkaitan dengan kesejahteraan principals (masyarakat) dan kepentingan publik. Tugas dari para stewards adalah mempertanggung jawabkan kinerjanya berupa pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel seperti sifat kualitatifnya yaitu bisa dibandingkan dan dipahami, andal, serta relevan. Tugas dan kewajiban lainnya adalah menginformasikan secara baik, jujur, dan terbuka mengenai pengelolaan dana desa melalui berbagai media

²⁰ Tika Rismawati, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

pelaporan keuangan yang para pihak terkait bisa akses dan menganggap bahwa principals memiliki hak untuk melihatnya juga dan juga pemerintahan desa (steward) juga melibatkan masyarakat (principals) untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa.²¹

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Tahun 1976 Jensen dan Mecling mencetuskan sebuah teori bernama teori agensi yang didalamnya membahas mengenai hubungan agen (pihak manajemen) dan prinsipal (pemilik perusahaan) yang berbeda kepentingan. Ketika pihak manajemen menerima tugas untuk menjalankan manajmene perusahaan oleh pemiliknya, maka akan terjadi hubungan kontraktual diantara keduanya. Apabila dikaitkan dengan lembaga sektor publik, pihak pemerintah desa di sini dianggap sebagai agents, semebtara masyarakat yang menjadi pihak principalsnya. Kegunaan teori ini adalah untuk mengetahui keberadaan lembaga yang mengabdikan diri pada masyarakat seperti perangkat desa dalam mempertanggung jawabkan apa yang ditugaskan kepada mereka, memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat, serta mendengarkan berbagai aspirasinya untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pemerintahan desa.²²

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut bahasa inggris, istilah akuntabilitas diambil dari istilah *accountable* atau *accountability* yang berarti “bisa dipertanggung jawabkan”. Akuntabilitas berarti sebuah kewajiban memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan dan menjawab kinerja

²¹ Faza Meila Fauzani, Atiek Sri Purwati, and Sudjono, Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8, no. 1 (2018): 5.

²² Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2021): 263.

seorang individu, pimpinan, atau badan hukum kepada pihak yang berwenang dan berhak untuk meminta atau menerimanya.²³

Akuntabilitas dalam PP No.71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya yang dibebankan kepada entitas pelapor untuk mewujudkan tujuan yang secara periodik telah dibuat.²⁴

Apabila dihubungkan dengan pengadaan pemerintah daerah, akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan daerah terkait kewajibannya mewujudkan otonomi daerah dan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya melalui sebuah media yang dari aspek kuantitas dan kualitasnya telah diukur dengan baik. Terkait pelaksanaan keajiban, wewenang, dan tugasnya, pemerintahan daerah wajib memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai aparat pemerintah.²⁵

Setiap desa berperan aktif dan strategis dalam upaya keberhasilan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah melalui sistem yang ada. Akuntabilitas terdiri atas beberapa pelaporan tanggung jawab seperti kedisiplinan pada aturan, pemerintah, masyarakat, organisasi, atau negara bukan hanya terkait keuangan²⁶. Dengan demikian, segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang pemerintah desa lakukan bisa terkontrol, terawasi dan dibatasi melalui adanya akuntabilitas ini.

Terdapat dua jenis akuntabilitas, yakni horizontal yang berhubungan terhadap masyarakat dan vertikal yang berhubungan

²³ Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*.

²⁴ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., 2010.

²⁵ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cet 1. (Jakarta: SinarGrafika, 2007).

²⁶ Ni Luh Ayu Mahayani, Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (2017): 129.

dengan pihak-pihak dengan otoritas yang paling tinggi seperti akuntabilitas dari pemerintahan pusat pada MPR, pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, atau berbagai unit kerja kepada pemerintahan daerah.²⁷

Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas terbentuk atas beberapa dimensi berikut:

- a. *Accountability for probity and legality* atau akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu akuntabilitas di lembaga publik yang dituntut untuk bekerja dengan jujur dan mematuhi aturan hukum yang ada. Dana publik harus digunakan dengan benar melalui otorisasi yang jelas.
- b. *Managerial accountability* atau akuntabilitas manajerial atau disebut juga akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggung jawaban secara efisien dan efektif oleh lembaga publik yang mengelola perusahaan. kustomer atau klien tidak boleh dibebani ketidakefisienan organisasi publik melainkan lembaga lah yang harus bertanggung jawab.
- c. *Program accountability* atau akuntabilitas Program yang berhubungan dengan pertimbangan bisa atau tidaknya

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009).

pencapaian tujuan serta pertimbangan alternatif program apa yang organisasi akan keluarkan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dengan biaya minimal. Pertanggung jawaban program harus dilakukan para lembaga publik hingga selesai pelaksanaannya. Bisa dikatakan bahwa akuntabilitas program merupakan program-program yang yang bisa mendukung dan mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

- d. *Policy accountability* atau akuntabilitas kebijakan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap pengambilan kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan diambil oleh para lembaga publik harus dipertanggung jawabkan resikonya di masa mendatang. Berbagai hal seperti siapa saja yang akan terdampak atau mendapatkan manfaat, siapa stakeholdernya dan sasarannya, alasan pengambilan, dan tujuan diambilnya kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dengan matang.
- e. *Financial accountability* atau akuntabilitas finansial, yaitu tanggung jawab lembaga publik dalam memakai money public atau uang publik tanpa korupsi, kebocoran, boros, dan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Hal yang diteaknkan dalam akuntabilitas jenis ini ialah jumlah finansial dan anggaran. Pengelolaan keuangan publik menjadi topik utama masyarakat sehingga akuntabilitas ini sangatlah penting.²⁸

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan akuntabilitas pada pemerintahan desa yaitu:

- a. Semua staf dan pemimpin instansi saling berkomitmen mengelola pelaksanaan misi secara akuntabel

²⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013).

- b. Menjamin konsistensi penggunaan sumberdaya sesuai hukum dan UU yang ada
- c. Mampu menunjukkan seberapa besar sasaran dan tujuan yang telah disusun dapat terwujud
- d. Berfokus pada tercapainya manfaat, hasil, serta visi misi yang sudah ditetapkan
- e. Bersifat inovatif, transparan, objektif, dan jujur.²⁹

2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas

Berikut indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang peneliti tetapkan pada penelitian ini:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
- d. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa.³⁰

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut bahasa inggris, istilah partisipasi disebut sebagai “*participation*” yang memiliki arti keikutsertaan atau mengambil bagian. Lebih lanjut partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan kelompok masyarakat atau seorang individu dalam penyelenggaraan pembangunan dengan mengikuti kegiatan atau memberi pernyataan berupa pemanfaatan dan menikmati hasilnya, memberikan materi, modal, keahlian, waktu, tenaga, dan pikirannya bagi pembangunan.³¹

²⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan and Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas Dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000).

³⁰ Alfitiana Dyah Novitasari and Priyatno Harsasto, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2019), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>.

³¹ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005).

Pada dasarnya peran serta atau partisipasi masyarakat adalah wujud dari keikutsertaan atau keterlibatan mereka secara sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.³²

Salah satu faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyelesaian pengembangan dan pembangunan pedesaan adalah partisipasi masyarakatnya. Masyarakat yang terlibat diajak untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di desanya bukan hanya dalam mengambil dan membuat suatu keputusan. Segala bentuk pembangunan akan mengalami kegagalan tanpa melibatkan masyarakatnya.

Islam juga menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat ini, dalam agama Islam bentuk partisipasi bisa berwujud sikap yang selalu tanggap, berlapang dada, inisiatif, atau menggunakan pengetahuannya yang luas dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Ayat 11 Q.S al-Mujadalah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

³² Ariningsih, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana).

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki beberapa prinsip berikut:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan;
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak;
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog;
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi;
- e. Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya;
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain;
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi

berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.³³

2.1.4.3 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mempunyai beberapa unsur berikut:

- a. Keikutsertaan dari partisipan melibatkan unsur jasmaniah, perasaan, dan mental
- b. Mengandung rasa sukarela dan kegembiraan dalam membantu kelompok masyarakat dengan menyumbangkan suatu hal demi mencapai tujuan bersama
- c. Memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran pada kelompoknya
- d. Meningkatkan kualitas hidup melalui sebuah peluang atau kesempatan
- e. Terdapat timbal balik antar kedua belah pihak.³⁴

2.1.4.4 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Terdapat 4 jenis partisipasi masyarakat, yakni:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi,

³³ Monique Samampouw, *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004).

³⁴ Iwan J. Azis et al., *Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).

koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan;

- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program;
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.³⁵

2.1.4.5 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa diukur menurut beberapa indikator berikut:

- a. Keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa.
- b. Terlibat dalam pengusulan rencana anggaran
- c. Terlibat dalam pengawasan dan pelaporan
- d. Terlibat dalam pemberian penilaian pengadaaan anggaran.³⁶

³⁵ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

³⁶ Suci Atiningsih and Aulia Cahya Ningtyas, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10, no. 1 (2019).

2.1.5 Transparansi

2.1.5.1 Pengertian Transparansi

Istilah transparansi berasal dari istilah “*transparency*” yang artinya prinsip keterbukaan diri terhadap hak-hak masyarakat agar mereka dapat mengakses informasi atau data-data terkait penyelenggaraan organisasi atau instansi yang bersifat jujur dan benar tanpa didiskriminasi dan tetap memperoleh jaminan atas perlindungan hak asasi golongan dan pribadi maupun rahasia negara.³⁷

Menurut Permen dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa “transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.³⁸

Dengan adanya transparansi ini akan membawa dampak positif terhadap kegiatan dari dana terhadap masyarakatnya karena mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pemerintahan desa dan menimbulkan rasa saling percaya antara masyarakat kepada pemerintahan desa melalui informasi yang diberikan oleh pemerintahan desa, dan dengan adanya informasi ini masyarakat dapat mengukur tingkat kinerja pemerintahan desa.

Allah SWT juga pernah menyinggung mengenai keterbukaan informasi atau transparansi pada Q.S Al-Baqarah ayat 282:

³⁷ Edah Jubaedah et al., *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* (Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I - LAN, 2008).

³⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايِنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengidtekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mengidtekan sendiri, maka hendaklah walinya mengidtekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang lakilaki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada lagi dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Nilai-nilai kejujuran sangat ditekankan dalam transparansi informasi sama halnya yang tertuang dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35 berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al Isra’: 35).

2.1.5.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip Trasparansi adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai informasi seperti wujud program atau bantuan, proses pelaksanaan, cara pelaksanaan, dan dana yang dikeluarkan bersifat mudah diakses dan dimengerti
- b. Terdapat informasi atau data terkait keuangan dan kegiatan-kegiatannya yang dipublikasikan melalui media yang mudah diakses
- c. Terdapat laporan berkala dan bukti berbentuk dokumen terkait pemanfaatan SDA dalam mengembangkan sebuah proyek yang bisa masyarakat umum akses
- d. Terdapat informasi atau data tahunan mengenai laporan keuangan beserta rincian kegiatannya dan bukti-bukti pendukung
- e. Terdapat media/website publikasi
- f. Terdapat pedoman dalam menyebarkan informasi/data.³⁹

2.1.5.3 Manfaat Transparansi

Melalui penyediaan berbagai informasi atau data yang akurat dan kemudahan mengaksesnya, transparansi mampu membangun

³⁹ Umi Purwanti, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90.

kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah desa atau sebaliknya. Manfaat lain dari transparansi tertuang dalam uraian berikut:

- a. Meminimalisir penyesuaian-penyesuaian ketidakpastian yang berkontribusi pada makro ekonomi dan stabilisasi fiskal.
- b. Melalui berbagai informasi mengenai pengeluaran/penerimaan, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah yang dipublikasikan, masyarakat akan lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi serta meningkatkan akuntabilitas dari media, lembaga legislatif, dan pemerintah desa. Berbagai kemungkinan tindakan seperti nepotisme, kolusi, atau korupsi juga bisa dicegah.
- c. Meningkatkan pemahaman, dukungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah desa
- d. Meningkatkan dan mendorong kapasitas usaha maupun investasi secara kondusif.⁴⁰

2.1.5.4 Indikator Transparansi

Transparansi terkait pengelolaan dana desa mempunyai beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Tersedianya aksesibilitas dokumen.
- b. Adanya kelengkapan dan kejelasan informasi.
- c. Adanya keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.⁴¹

⁴⁰ Eva Julita and Syukriy Abdullah, *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 213–221.

⁴¹ Purwanti, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*.

2.1.6 Dana Desa

2.1.6.1 Pengertian Desa

Menurut bahasa sansekerta, desa berasal dari istilah “*deshi*” yang mempunyai arti tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Secara terminologi desa diartikan sebagai sebuah wilayah yang terletak jauh dari keramaian dan mempunyai organisasi yang warganya jalani bersama-sama.⁴²

UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa menyebutkan “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴³

Kesimpulannya, desa adalah sebuah pemerintahan yang berada di bawah NKRI dalam sebuah sistem pemerintahan nasional yang berdiri dengan mandiri. Istilah desa bisa diganti dengan istilah lainnya sesuai adat, budaya, dan sifat dari masing-masing wilayah sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah.

2.1.6.2 Pengertian Dana Desa

Dana Desa diartikan sebagai daya yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kota atau kabupaten untuk mendanai penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan, pembinaan, pembangunan, dan kegiatan pemerintahan lainnya.⁴⁴

⁴² Totok Gunawan et al., *Fakta Dan Konsep Geografi* (Jakarta: Inter Plus, 2007).

⁴³ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

⁴⁴ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014).

Desa telah dijadikan sebagai pusat utama peningkatan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan telah dituangkan dalam UU. Agar kesejahteraan dan ekonomi masyarakat meningkat, desa diberi sumber dana dan kewenangan dalam mengelola potensi-potensinya sendiri.⁴⁵

2.1.6.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pemerintah pusat akan menyalurkan dan mengalokasikan dana desa melalui Kota atau Kabupaten dengan cara memindahkannya dari RKUN ke RKUD sesuai isi dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dana yang dialokasikan pemerintah pusat kemudian dibagikan oleh pihak Kota atau Kabupaten kepada masing-masing desa yang jumlahnya didasarkan atas beberapa kriteria seperti 50% menurut angka kemiskinannya, 20% menurut luas wilayahnya, dan 30% menurut banyaknya penduduk. Proses penyaluran dana desa memiliki beberapa tahapan dan dilakukan maksimal 7 hari setelah dana dikirimkan ke RKUD.⁴⁶

2.1.6.4 Tujuan Dana Desa

UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa menyebutkan bahwa pengalokasian dana desa awalnya hanya untuk pembangunan desa dengan fokus utama perbaikan infrastruktur, namun etelah tujuan tersebut telah terwujud, fokus pengalokasiannya berubah kepada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan, penanggulangan kesenjangan pendapatan, peningkatan peluang kerja, dan peningkatan keterampilan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁶ Pretty A. Langkun, Ventje Ilat, and Rudy J. Pusung, Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 54–57.

⁴⁷ Suharyono Soemarwoto, *Catatan Penting Ke-Indonesia -an Kita Jilid 2* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”. Berikut proses pengelolaannya:

a. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai proses penaksiran belanja dan pendapatan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Keuangan desa akan direncanakan setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang merupakan dasar penyusunan APBDesa selesai disusun sesuai Permen dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

b. Pelaksanaan

Pasal 24-34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa terdapat beberap hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan APBDesa, yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;

5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Penatausahaan keuangan desa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Pelaporan

Pelaporan ialah proses penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan dalam kurun waktu tertentu sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas yang diterimanya. Sesuai Permen Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pelaksanaan APBDesa setiap semester disusun dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada walikota atau bupati.

e. Pertanggungjawaban

Sesuai Permen Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan di dalam Forum Musyawarah Desa.⁴⁸

⁴⁸ Suci Febriyanti and Halmawati Halmawati, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2331–2347.

2.1.7.1 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas yang menjadi jiwa atau nilai dari pengelolaan dana desa disebut asas pengelolaan desa yang terdiri atas:

- a. Disiplin dan tertib
- b. Partisipasi
- c. Akuntabel
- d. Transparan.⁴⁹

2.7.1.2 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Dalam peneliiian ini, indikator pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.⁵⁰

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I “Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat, Pada	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (Y).	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa

⁴⁹ *Peraturan Lengkap Desa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁵⁰ Febriyanti and Halmawati, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam).

	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”.		di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2.	Lasmi Yupita, Verni Julita (2020) “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2), Kelembagaan Desa (X3), Kesejahteraan Masyarakat (Y).	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai tanang.
3.	Ricky Prayogi (2019) “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3), Partisipasi Masyarakat (Y)	Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balapulung Wetan.

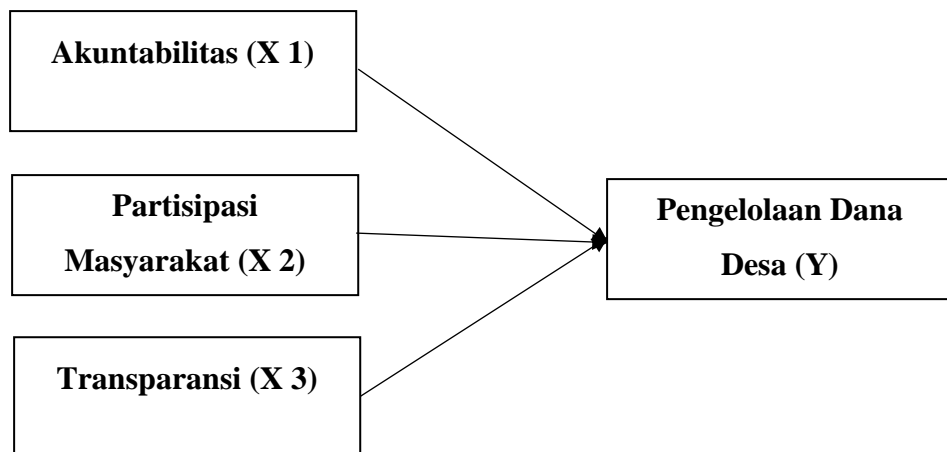
	Balapulang Wetan)”		
4.	Prihasantyo Siswo Nugroho, dkk (2022) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”.	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
5.	Nada Salsabila Ramadhani, Anik Yuliat (2021) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.”	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengelolalan Alokasi Dana Desa (Y)	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka pemikiran teoritik merupakan sebuah peta konsep hubungan antara faktor-faktor yang diteliti yang sesuai dengan landsan teori yang dipakai. Pada penelitian ini variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen, dimana variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa, sementara variabel independen yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan Transparansi. Pokok bahasan pada penelitian ini yaitu Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), dan Pengaruh Transparansi (X3) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Serta Pengaruh ketiga variabel independen atau variabel X secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel Y. Pokok bahasan tersebut dituangkan dalam model kerangka pemikiran teoritik sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Teoritik



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang berdasarkan teori terkait tetapi belum mendapat hasil yang pasti atau fakta empiris dari penelitian pada

rumusan masalah sebuah penelitian. Pada Hipotesis penelitian digunakan agar memberi petunjuk dan rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan dugaan sementara atau hipotesis dari penelitian ini:

2.4.1 Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan dan menjawab kinerja seorang individu, pimpinan, atau badan hukum kepada pihak yang berwenang dan berhak untuk meminta atau menerimanya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Lasmi Yupita, Verni Julita pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam” dengan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada hasil riset tersebut, peneliti kemudian membuat sebuah hipotesis berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2.4.2 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat ialah wujud dari keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini pada 2019 berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat, Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” dengan indikator partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektifitas

pengelolaan dana desa. Mengacu pada hasil riset tersebut, peneliti kemudian membuat sebuah hipotesis berikut:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2.4.3 Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi ialah prinsip keterbukaan diri terhadap hak-hak masyarakat agar mereka dapat mengakses informasi atau data-data terkait penyelenggaraan organisasi atau instansi yang bersifat jujur dan benar tanpa didiskriminasi dan tetap memperoleh jaminan atas perlindungan hak asasi golongan dan pribadi maupun rahasia negara.

Hasil penelitian dari Ricky Prayogi pada 2019 berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan)” yang indikatornya adalah transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Mengacu pada hasil riset tersebut, peneliti kemudian membuat sebuah hipotesis berikut:

H3: Transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Peneliti menetapkan kuantitatif berbasis deskriptif sebagai metode penelitian dalam penelitian ini. Kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan menguji sebuah hipotesis yang sudah ditetapkan, menganalisis data secara kuantitatif statistik, mengumpulkan data penelitian melalui sebuah instrumen pada sebuah sampel yang diambil secara random dan penelitiannya didasarkan atas filsafat positivisme⁵¹. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kehidupan yang sebenarnya atau di lapangan langsung sehingga disebut juga sebagai *field research* atau penelitian lapangan⁵². Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan melalui penggalian data dari lapangan atau lokasi penelitian yakni tempat tinggal para responden di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

3.1.2 Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer sebagai sumber dan jenis data dalam mengumpulkan berbagai informasi atau data dari onjek penelitian yaitu Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Data primer sendiridartikan sebagai informasi atau data yang peneliti gunakan dan kumpulkan dari informan atau objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian secara langsung. Peneliti juga memanfaatkan kuesioner dalam studi lapangannya. Para responden yaitu warga Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, kabupaten Tanah Datar yang sudah berusia 17 tahun lebih atau yang sudah mempunyai hak pilih diminta mengisi berbagai

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁵² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang peneliti bagikan kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam menganalisis data-data yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Suatu wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat subjek atau objek penelitian yang memenuhi karakteristik atau kriteria penelitian yang peneliti telah tetapkan disebut populasi⁵³. Populasi yang peneliti gunakan di sini yaitu seluruh masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berusia lebih dari 17 tahun atau yang sudah mempunyai hak suara. Peneliti menganggap bahwa mereka yang berusia lebih dari 17 tahun adalah mereka yang sudah cakap hukum dan dewasa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian⁵⁴. Peneliti menetapkan sampel melalui teknik *proportional random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Dimana pada penelitian ini, sampel diambil dari 5 jorong yang ada di Nagari sumpur, untuk mewakili sampel penelitian. Peneliti menggunakan metode Slovin dalam perhitungan jumlah sampelnya melalui rumus berikut:

$$n = \frac{N}{1 \pm Ne^2}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁵⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

e : Tingkat standar error

Tingkat standar error yang dipakai pada penelitian ini adalah 10%, sehingga didapat sampel dari penelitian ini sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{2183}{1+2183 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{2183}{1+21,83}$$

$$n = \frac{2183}{22,83}$$

$$n = 95,62$$

Sehingga didapatkan jumlah sampel pada penelitian sebesar 95,62 yang dibulatkan menjadi 96 orang responden. Dan untuk menentukan jumlah sampel dari kelima jorong tersebut menggunakan rumus proportional berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

ni : Banyaknya sampel tiap jorong

n : Banyaknya sampel (96 Orang)

Ni : Banyaknya anggota tiap jorong

N : Banyaknya anggota populasi seluruhnya (2183 Orang)

Maka jumlah anggota sampel :

1. Jorong Nagari = 291 Orang

$$ni = \frac{291}{2183} \times 96$$

$$ni = 12,8 = 13$$

2. Jorong Seberta = 624 Orang

$$ni = \frac{624}{2183} \times 96$$

$$ni = 27,4 = 27$$

3. Jorong Sudut = 595 Orang

$$ni = \frac{595}{2183} \times 96$$

$$ni = 26,1 = 26$$

4. Jorong Kubu Gadang = 284 Orang

$$ni = \frac{284}{2183} \times 96$$

$$ni = 12,5 = 13$$

5. Jorong Batu Beragung = 389 Orang

$$ni = \frac{389}{2183} \times 96$$

$$ni = 17,1 = 17$$

$$ni = 13 + 27 + 26 + 13 + 17 = 96$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menyebarkan sebuah kuesioner atau angket dalam mengumpulkan data primer. Kuesioner/angket ialah sekumpulan pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tulisan yang peneliti gunakan dalam menghimpun informasi terkait persepsi, pendapat, sifat atau lainnya dari para

responden yang mengisinya⁵⁵. Kuesioner yang peneliti bagikan langsung ketika menemui para responden berisi beberapa pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yang harus diisi oleh responden. Setelah itu, data tersebut akan diuji dengan menggunakan uji keabsahan data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian terdiri atas 2 jenis variabel yaitu, variable dependen dan variabel independen sedangkan variabel yang dipakai pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Variabel dependen, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Dana Desa
- b. Variabel independen, yaitu:
 - 1) Akuntabilitas
 - 2) Partisipasi Masyarakat
 - 3) Transparansi

Penentuan variabel penelitian ditujukan agar mengetahui operasional yang tetap agar dapat diukur. Penjelasan lebih lengkapnya telah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1

Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas	Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan	a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar	Pengukuran melalui kuesioner/angket dan skala interval.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)* (Jambi: Syariah Press, 2014).

	<p>pemerintahan daerah terkait kewajibannya mewujudkan otonomi daerah dan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya melalui sebuah media yang dari aspek kuantitas dan kualitasnya telah diukur dengan baik</p>	<p>prosedur pelaksanaan.</p> <p>b. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.</p> <p>c. Adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>d. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa.</p>	
Partisipasi Masyarakat	<p>Wujud dari keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan</p>	<p>a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa.</p> <p>b. Mengusulkan rencana anggaran.</p> <p>c. Terlibat mengawasi dan melaporkan.</p> <p>d. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.</p>	<p>Pengukuran melalui kuesioner/angket dan skala interval.</p>

	rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.		
Transparansi	Prinsip keterbukaan diri terhadap hak-hak masyarakat agar mereka dapat mengakses informasi atau data-data terkait penyelenggaraan organisasi atau instansi yang bersifat jujur dan benar tanpa didiskriminasi dan tetap memperoleh jaminan atas perlindungan hak asasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen. b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi. c. Adanya keterbukaan proses. d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 	Pengukuran melalui kuesioner/angket dan skala interval.

	golongan dan pribadi maupun rahasia negara		
Pengelolaan Dana Desa	“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap perencanaan b. Tahap pelaksanaan c. Tahap penatausahaan d. Tahap pelaporan e. Tahap pertanggung jawaban 	Pengukuran melalui kuesioner/angket dan skala interval.

Dalam hal pengukuran, penelitian ini menggunakan pengukuran skala Interval, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai terhadap preferensi tersebut⁵⁶. Skala interval ini menggunakan instrument skala Likert. Kuesioner yang akan disebar akan dilengkapi dengan lima alternatif jawaban, dan masingmasing jawaban mengandung skor, yaitu:

- STS : Sangat Tidak Setuju Skor 1
- TS : Tidak Setuju Skor 2
- N : Netral Skor 3

⁵⁶ Rambat Lupiyoadi and Ridho Bramulya Ikhsan, *Praktikum Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

S : Setuju Skor 4

SS : Sangat Setuju Skor 5

3.5 Teknik Analisi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Kegiatan analisis data adalah mengklasifikasikan data berdasarkan variabel, membuat tabel berdasarkan variabel serta melakukan perhitungan terhadap dugaan sementara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah statistik inferensial parametris. Statistik inferensial parametris adalah metode kuantitatif yang pengukurannya menggunakan sampel yang menjadi perwakilan dari suatu populasi, kemudian hasil analisis data untuk suatu populasi ditetapkan berdasarkan sampel yang bersifat probability. Pada statistik parametris data harus berdistribusi normal.

3.5.1 Uji Keabsahan Data

Untuk menguji kualitas suatu data maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji ini dipakai untuk mengukur keakuratan suatu data. Validitas dapat didefinisikan juga sebagai keshahihan data, dimana uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat dan teliti variabel penelitian⁵⁷. Sebuah instrument atau data dikatakan valid apabila instrument tersebut memberikan ketepatan dalam pengukuran. Nilai r hitung disandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 10% atau 0,1, jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel maka dinyatakan item pernyataan pada kuesoner valid.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Tahapan pengolahan data yang bertujuan untuk konsistensi hasil pengukuran disebut reliabilitas⁵⁸. Reliabilitas erat kaitannya dengan konsistensi, maksudnya adakah pengujian dilakukan dapat konsisten dan dipertanggungjawabkan ketepatan pengukurannya. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji sebuah instrumen dapat memberikan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Metode yang biasanya dipakai untuk menetapkan suatu data reliabel atau tidak adalah dengan melihat, apabila nilai Alpha Cronbach nya melebihi 0,70 maka dapat dinyatakan butir pernyataan yang ada dalam kuesoner reliabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Ketepatan pengukuran yang diperoleh pada analisis regresi akan dilihat dari uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan sebelum melaksanakan uji hipotesis, uji simultan dan uji parsial. Uji asumsi klasik yang peneliti pakai ialah uji normalitas, uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengukuran menggunakan uji normalitas ditujukan untuk melihat signifikansi faktor lain atau residual⁵⁹. Pada teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif inferensial, pada metode ini terbagi menjadi dua yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Perbedaan keduanya terletak pada uji normalitas, dimana pada statistik parametris data yang dianalisis harus berdistribusi normal, sebaliknya pada statistik non parametris tidak memerlukan uji normalitas. Peneliti menganalisis data melalui teknik statistik parametris, sehingga perlu dilakukan uji normalitas menggunakan pendekatan Kalmogorov Smirnov. Data yang berdistribusi normal dapat dilihat dari output nilai

⁵⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

⁵⁹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan Aplikasi SPSS 16.0* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009).

asymptotic significance yang lebih besar dari 10% atau 0,1, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal nilai asymptotic signifikansinya lebih kecil dari 10%.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukannya pengujian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi yang peneliti gunakan. Model dikatakan semakin baik jika korelasinya bernilai semakin kecil. Nilai korelasi ditentukan oleh VIF. Model regresi dianggap terbebas dari masalah multikolinieritas jika nilai toleransinya $< 0,1$ dan nilai VIF $< 10^{60}$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji pada persamaan regresi terjadi penyimpangan asumsi klasik atau perbedaan varian dari suatu residual pada penelitian lain yang konstan. Pada uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut residual. Pengambilan keputusan melalui output SPSS dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,1 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian, sebaliknya jika nilai signifikansinya $< 0,1$ berarti terdapat heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Statistik

3.5.3.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis statistika yang bertujuan mencari model linier antara variabel bebas (independen) atau regresor terhadap variabel respons atau dependen⁶¹. Berbeda pada model regresi linier sederhana yang memakai suatu variabel bebas, pada model persamaan regresi linier berganda variabel bebas yang

⁶⁰ Duwi Priyanto, *Analisis Korelasi Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2011).

⁶¹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

dipakai banyak atau multiple. Selain itu uji ini juga dipakai untuk mengetahui hubungan positif atau negatif masing-masing variabel dan memperkirakan naik atau turunnya nilai variabel bebas.

Persamaan regresi untuk melakukan pengujian pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana Desa

A = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien persamaan regresi variabel X_1, X_2, X_3

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Transparansi

e = Error

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis menggunakan uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi variabel independent secara simultan terhadap variabel dependent. Nilai R² berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam memberikan informasi untuk mendeteksi variabel dependen terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi yang besar, maka dapat diartikan variabel independent memiliki kontribusi yang besar pula terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji F (Uji Simultan)

Pengukuran yang dilakukan pada uji ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap

variabel terikat. Pengambilan keputusan pada uji ini dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut⁶²:

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ketiga diterima. Dimana variabel X bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. F tabel ditetapkan dengan cara mencari derajat bebas yaitu $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = N - k$. N adalah keterangan dari jumlah sampel yang digunakan, dan k adalah jumlah variabel.

Taraf signifikan yang dipakai pada penelitian ini adalah 10% atau 0,1.

3.5.3.4 Uji t (Uji Parsial)

Analisis menggunakan uji ini dilakukan untuk mengetahui secara personal pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Untuk setiap koefisien regresi diuji secara terpisah (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Pengambilan keputusan pada uji ini dengan cara membandingkan nilai uji t, apabila nilai t hitung melebihi nilai t tabel maka terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent, dengan derajat kepercayaan sebesar 10%. Pada penelitian ini uji t ditujukan untuk mengetahui apakah variabel X1 yaitu Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel Y pengelolaan dana desa, variabel X2 yaitu Partisipasi Masyarakat terhadap variabel Y, serta variabel X3 yaitu Transparansi terhadap variabel Y.

⁶² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: UNDIP, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Nagari Sumpur

Nagari Sumpur terletak di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat tepatnya di sebelah utara Danau Singkarak yang di aliri oleh aliran Batang air Sumpur. Untuk menuju ke Nagari Sumpur diperkirakan menempuh perjalanan dari Bandara Internasional Minangkabau lebih kurang 2 jam perjalanan. Nagari Sumpur berbatasan langsung dengan Nagari Malalo disebelah Barat, Nagari Batu Taba di sebelah timur dan Nagari Tanjung Barulak disebelah utara sementara disebelah selatan berbatasan langsung dengan Danau Singkarak.

Luas Nagari Sumpur: 7,87 kilometer persegi atau 9,51 persen dari luas wilayah Kecamatan Batipuh Selatan. Nagari Sumpur berjarak 2,4 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 32,8 kilometer dari ibu kota kabupaten. Koordinat: 0,57304 Lintang Selatan – 100,48812 Bujur Timur Ketinggian: 400-420 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Nagari Sumpur terdiri dari 5 jorong, yakni:

- a. Jorong Nagari
Koordinat: 0,52542 LS – 100,49237 BT, ketinggian 502 mdpl, luas: 0,65 kilometer persegi, jumlah penduduk: 291 jiwa.
- b. Jorong Seberang Aia Taman (Seberta)
Koordinat: 0,52562 LS – 100,48804 BT, ketinggian 409 mdpl, luas: 2,71 kilometer persegi, jumlah penduduk: 624 jiwa.
- c. Jorong Sudut
Koordinat: 0,54049 LS – 100,48637 BT, ketinggian 389 mdpl, luas: 2,6 kilometer persegi, jumlah penduduk: 595 jiwa.
- d. Jorong Kubu Gadang

Koordinat: 0,52754 LS – 100,49871 BT, ketinggian 479 mdpl, luas: 0,93 kilometer persegi, jumlah penduduk: 284 jiwa.

e. Jorong Batu Beragung

Koordinat: 0,53174 LS – 100,49997 BT, ketinggian 407 mdpl, luas: 0,98 kilometer persegi, jumlah penduduk: 389 jiwa.

Sejarah Rumah Gadang di Nagari Sumpur, Saat Perang Paderi tahun 1821-1837 banyak rumah gadang yang berkurang oleh karena kondisi sosial politik masa perang, banyak rumah gadang dibakar dan hancur di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terdapat sekitar 200 lebih rumah gadang, sebagian besar berada di Jorong Nagari, yaitu salah satu jorong di Nagari Sumpur, sejalan waktu Jumlah tersebut berkurang secara drastis, terutama disebabkan oleh terjadinya gejolak sosial-politik pemerintahan di masa perang Paderi. Pada bulan Oktober 2013 jumlah rumah gadang yang ada di Nagari Sumpur tinggal 45 rumah. Kondisinya, ada 30 rumah yang masih layak huni, sedangkan 15 rumah yang tidak layak huni atau butuh renovasi. Berdasarkan jumlah ruangnya, rumah gadang di Nagari Sumpur dapat dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu rumah gadang baanjuang kecil, rumah gadang bagonjong, rumah gadang baanjuang besar.

Nagari Sumpu memiliki alam yang masih asri sehingga wisatawan bisa menikmati alamnya yang indah seperti Hamparan sawah, puncak Tubia, Aliran Sungai/Batang Air, Danau siingkarak dan juga air terjun. Selain wisata budaya dan wisata alam, wisatawan juga bisa merasakan kuliner tradisional sumpu, seperti Rendang sumpu, rebon, singgang sumpu dan pangek sumpu, teristimewa Ikan Bilih yang hanya ada 2 di dunia tetap kami jaga kelestariannya. Selain itu wisatawan juga bisa menikmati Buah Sawo dengan kualitas terbaik. Nagari Sumpu juga menyajikan Paket-paket wisata lainnya, seperti wisata edukasi (bertani, manjalo dan masak rendang) dan paket wisata pertunjukan kesenian tradisional sumpu seperti Kesenian tari, randai dan silat tradisional sumpu.

Nagari Sumpur mendapatkan penerimaan dana yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, dimana anggaran tahun 2017 Rp.796.788.000, tahun 2018 Rp.695.723.000, tahun 2019 Rp.825.247.000, tahun 2020 Rp.763.099.000, tahun 2021 Rp.784.638.000. Walaupun pernah mengalami penurunan yang lumayan jauh pada tahun 2018 namun meningkat lagi pada 2019.

4.1.2 Struktur Organisasi

Dibutuhkan sebuah koordinasi dengan kesatuan perintah yang menunjukkan kegiatan tertentu dengan fungsi dan tugas berbeda dalam menjalankan sebuah tugas. Kewajiban dan tugas yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik jika dilakukan secara bersama-sama sesuai tanggung jawab dan pembagian tugas yang sesuai dan jelas. Hal ini juga berlaku di Nagari Sumpur, di dalamnya juga terdapat susunan organisasi yang menjadi kerangka penggambaran hubungan antar bagian atau tingkatan tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Pembagian wewenang dan tugas di Nagari Sumpur juga dilakukan dengan sangat baik dan jelas. Berikut struktur organisasi tersebut:

Tabel 4. 1

Struktur organisasi Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan

No	Nama	Jabatan
1.	Ade Hendrico, ST	Wali Nagari
2.	Winda Silviana	Sekretaris
3.	Vivi Agustina Nisrita, S.Si	Kaur TU & Umum
4.	Siska Amelia, SE	Kaur Keuangan
5.	Ryan Naldo, AMd.T	Kaur Perencanaan
6.	Siska Palentina	Kasi Pemerintahan
7.	Ridho Lisman	Kasi Kesejahteraan
8.	Nofri Yanti	Kasi Pelayanan

9.	Usman, S.Ag	Kepala Jorong Kubu Gadang
10.	David	Kepala Jorong Sudut
11.	Reza Esfan	Kepala Jorong Nagari
12.	Erwan	Kepala Jorong Seberta
13.	Dedy Haryanto	Kepala Jorong Batu Beragung

4.1.3 Deskriptif Data Penelitian

Kuesioner yang peneliti bagikan langsung ketika menemui para responden berisi beberapa pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yang harus diisi oleh responden. Tujuan peneliti menemui responden secara langsung adalah untuk mewujudkan efektivitas peningkatan tingkat respon dari para respondennya. Peneliti mengelilingi desa dan menemui 96 warga atau responden yang telah memenuhi kriteria penelitian satu per satu pada 30 September 2022 hingga 2 Oktober 2022.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebarikan oleh peneliti kepada masyarakat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	63	66%
Perempuan	33	34%
Total	96	100%

Dari data diatas disimpulkan bahwa responden laki-laki telah mendominasi data dalam penyebaran kusioner ini. Dari hasil itu, didapat bahwa responden laki-laki berjumlah 63 orang dan responden perempuan berjumlah 33 orang.

4.2.2 Usia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
17-30	35	36%
31-40	18	19%
41-50	21	22%
51-60	18	19%
>60	4	4%
Total	96	100%

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 17-30 tahun dengan berbagai usia responden mulai dari 17-30 tahun sebanyak 35 orang, 31-40 tahun sebanyak 18 orang,

41-50 tahun sebanyak 21 orang, 51-60 tahun sebanyak 18 orang, dan lebih dari 60 tahun sebanyak 4 orang.

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok pekerjaan masyarakat Nagari Sumpur adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Wiraswasta	28	29%
Ibu Rumah Tangga	24	25%
Petani	16	17%
Nelayan	10	10%
Mahasiswa/Pelajar	7	7%
PNS	4	4%
Karyawan	3	3%
Honorar	2	2%
Buruh Harian Lepas	2	2%
Total	96	100%

Dari data diatas disimpulkan bahwa responden dengan pekerjaan wiraswasta telah mendominasi data dalam penyebaran kusioner ini. Dari hasil itu, didapat bahwa responden dengan pekerjaan wiraswasta berjumlah 28 orang, ibu rumah tangga 24 orang, petani 16 orang, nelayan 10 orang, mahasiswa/pelajar 7 orang, PNS 4 orang, karyawan 3 orang, honorar 2 orang dan buruh harian lepas 2 orang.

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan diinterpretasikan yaitu perolehan hasil dari teknik analisis data menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji statistik dan uji hipotesis. Berikut akan dijelaskan interpretasi hasil dari pengujian tersebut.

4.3.1 Uji Keabsahan Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Sebuah instrumen atau data dikatakan valid apabila instrument tersebut memberikan ketepatan dalam pengukuran. Dalam penelitian ini pengukuran uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara r-hitung dengan r-tabel. Item pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan jika memenuhi r hitung lebih besar dari r tabel. Dimana r tabel dapat diketahui dengan mencari derajat kebebasan $df (n-2)$ dimana n merupakan jumlah sampel, maka hasil df adalah 94. Maka nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 10% adalah 0,2371. Pada penelitian ini peneliti dibantu aplikasi SPSS tipe 23 untuk mengolah data.

Tabel 4. 5

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)

Item Kuesioner	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,755	0,2371	Valid
X1.2	0,853	0,2371	Valid
X1.3	0,781	0,2371	Valid
X1.4	0,716	0,2371	Valid
X1.5	0,649	0,2371	Valid

Dapat diketahui dari tabel 4.5 bahwa nilai r hitung dari masing-masing item pernyataan variabel Akuntabilitas (X1) lebih besar dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel X1 valid.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

Item Kuesioner	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,750	0,2371	Valid
X2.2	0,743	0,2371	Valid
X2.3	0,696	0,2371	Valid
X2.4	0,707	0,2371	Valid
X2.5	0,765	0,2371	Valid

Dapat diketahui dari tabel 4.6 bahwa nilai r hitung dari masing-masing item pernyataan variabel Partisipasi Masyarakat (X2) lebih besar dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel X2 valid.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X3)

Item Kuesioner	R hitung	R tabel	Keterangan
X3.1	0,817	0,2371	Valid
X3.2	0,763	0,2371	Valid
X3.3	0,786	0,2371	Valid
X3.4	0,701	0,2371	Valid
X3.5	0,719	0,2371	Valid

Dapat diketahui dari tabel 4.7 bahwa nilai r hitung dari masing-masing item pernyataan variabel Transparansi (X3) lebih besar

dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel X3 valid.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Item Kuesioner	R hitung	R tabel	Keterangan
Y.1	0,801	0,2371	Valid
Y.2	0,796	0,2371	Valid
Y.3	0,625	0,2371	Valid
Y.4	0,843	0,2371	Valid
Y.5	0,752	0,2371	Valid

Dapat diketahui dari tabel 4.8 bahwa nilai r hitung dari masing-masing item pernyataan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) lebih besar dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel Y valid.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas erat kaitannya dengan konsistensi, maksudnya apakah pengujian dilakukan dapat konsisten dan dipertanggungjawabkan ketepatan pengukurannya. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji sebuah instrumen dapat memberikan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Sama halnya dengan uji validitas peneliti menggunakan aplikasi SPSS tipe 23 untuk mengukur apakah sebuah instrument yang diteliti reliabel atau tidak. Metode yang biasanya dipakai untuk menetapkan suatu data reliabel atau tidak adalah dengan melihat nilai Alfa Cronbach. Nilai Alfa Cronbach dapat dilihat dari hasil output SPSS, jika nilai Alfa nya melebihi 0,7 maka item pernyataan pada variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, X3, Y

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Corrected Item Total Correlation	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,808	Masing-masing nilai signifikansi < 10%	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,780	Masing-masing nilai signifikansi < 10%	Reliabel
Transparansi (X3)	0,812	Masing-masing nilai signifikansi < 10%	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,824	Masing-masing nilai signifikansi < 10%	Reliabel

Tabel 4. 10

Indeks Nilai Reliabilitas

Indeks nilai reliabilitas	Kriteria
<0,2	Amat rendah
0,2-0,4	Rendah
0,4-0,5	Cukup
0,5-0,8	Tinggi
0,8-%	Amat tinggi

Dapat diketahui pada tabel 4.9 nilai Alpha Cronbach masing-masing variabel termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap variabel mempunyai nilai reliabel yang tinggi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat signifikansi faktor lain atau residual. Uji Normalitas Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah statistic parametris, sehingga perlu dilakukan uji normalitas menggunakan pendekatan Kalmogorov Smirnov. Data yang berdistribusi normal dapat dilihat dari output nilai Asymp sig yang lebih besar dari 10% atau 0,1, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal nilai Asymp sig nya lebih kecil dari 10%.

Tabel 4. 11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67418292
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.050
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Merujuk pada tabel 4.11 dari hasil output uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogorov Smirnov data berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai (Asymp.Sig 2-tailed) yang lebih besar dari nilai signifikansi 10% yaitu $0,200 > 0,10$.

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Salah satu bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda ialah Uji Multikolinieritas. Pengujian ini ditujukan untuk melihat dua atau lebih variabel independen yang saling berkorelasi pada analisis regresi linier berganda. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas maka model regresi nya tidak baik. Korelasi antar variabel bebas yang bernilai nol disebut variabel orthogonal. Pada penelitian ini gejala multikolinieritas bisa dideteksi dengan melihat nilai melihat nilai

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Indikasi multikolinieritas tidak terjadi apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleran besar dari 0,10.

Tabel 4. 12

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	.398	2.515
Partisipasi Masyarakat	.382	2.616
Transparansi	.384	2.605

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Merujuk pada tabel 4.12 hasil nilai VIF variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai sebesar 2,515, variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 2,616 dan variabel Transparansi (X3) sebesar 2,605. Nilai VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada indikasi multikolinieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan asumsi klasik dalam persamaan regresi atau perbedaan varian dari suatu residual dari penelitian lain yang konstan. Pada uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut residual. Pengambilan keputusan melalui output SSPSS dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,1

berarti tidak terdapat heterokedastisitas dalam penelitian, sebaliknya jika nilai signifikansi nya $< 0,1$ berarti terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4. 13

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.654	.939		1.762	.081
Akuntabilitas	.038	.066	.094	.572	.569
Partisipasi Masyarakat	-.015	.063	-.040	-.240	.811
Transparansi	-.040	.065	-.104	-.622	.535

a. Dependent Variable: Abs_Res

Merujuk pada Tabel 4.13 dinyatakan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X1) yaitu 0,569, nilai signifikansi Partisipasi Masyarakat (X2) yaitu 0,811 dan nilai signifikansi Transparansi (X3) yaitu 0,535, dimana nilai ketiganya lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,1.

4.3.3 Uji Statistik

4.3.3.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pengukuran pada uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif. Berikut output SPSS hasil regresi linier berganda:

Tabel 4. 14

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.346	1.494		2.909	.005
Akuntabilitas	.235	.106	.228	2.228	.028
Partisipasi Masyarakat	-.079	.100	-.082	-.786	.434
Transparansi	.657	.103	.667	6.388	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Partisipasi Masyarakat

X3 = Transparansi

e = error

Dari model persamaan regresi diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 4,346 + 0,235X_1 - 0,079X_2 + 0,657X_3$$

Dari persamaan regresi linier diatas maka dapat diinterpretasikan hasilnya sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas adalah 4,346. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga dapat diartikan bahwa, ketika nilai variabel X_1 , X_2 dan X_3 yaitu, akuntabilitas partisipasi masyarakat dan transparansi konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel pengelolaan dana desa (Y) berubah menjadi nilai konstanta yaitu 4,346.
- b) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X_1) pada persamaan regresi diatas adalah 0,235. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif (searah) antara variabel. Sehingga dapat diartikan bahwa, apabila nilai variabel lain adalah konstan, maka nilai variabel pengelolaan dana desa (Y) meningkat 0,235 setiap satu satuan variabel akuntabilitas (X_1) ditingkatkan.
- c) Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X_2) pada persamaan regresi diatas adalah -0,079. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel. Sehingga dapat diartikan bahwa, apabila nilai variabel lain adalah konstan, maka nilai variabel pengelolaan dana desa (Y) menurun -0,079 setiap satu satuan variabel partisipasi masyarakat (X_2) ditingkatkan.
- d) Nilai koefisien regresi variabel transparansi (X_3) pada persamaan regresi diatas adalah 0,657. Sehingga dapat diartikan bahwa, apabila nilai variabel lain adalah konstan, maka nilai variabel pengelolaan dana desa (Y) meningkat

0,657 setiap satu satuan variabel transparansi (X3) ditingkatkan.

4.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengukuran menggunakan uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau berkontribusi terhadapnya. Berikut merupakan hasil output data SPSS pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4. 15

Hasil Uji koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.615	.603	1.701

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

Dapat diketahui dari tabel 4.15 hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,615, berarti nilai variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi yang berkontribusi terhadap variabel pengelolaan dana desa sebesar 61,5%. Dan sebesar 38,5% sisanya kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti.

4.3.3.3 Uji F (Uji Simultan)

Uji F ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas secara simultan signifikan terhadap variabel terikat. Dengan membandingkan nilai F tabel dan nilai F hitung maka diperoleh hasil output uji F:

Tabel 4. 16

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	426.215	3	142.072	49.087	.000 ^b
Residual	266.274	92	2.894		
Total	692.490	95			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

F tabel dapat dihitung dengan mencari derajat bebas ($df_1 = k-1$) dan ($df_2 = N-k$), dimana N adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel.

Maka $df_1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = 96 - 4 = 92$, sehingga F tabel adalah 2,14.

Dapat diketahui tabel 4.16 hasil Uji F diketahui nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai $49,087 > 2,14$ dan nilai probabilitas kurang dari 0,1 yaitu 0,000. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan dana desa. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

4.3.3.4 Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, apakah hasilnya signifikan atau tidak. Hasil dari uji t ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4. 17

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.346	1.494		2.909	.005
Akuntabilitas	.235	.106	.228	2.228	.028
Partisipasi Masyarakat	-.079	.100	-.082	-.786	.434
Transparansi	.657	.103	.667	6.388	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Dasar pengambilan keputusan hasil dari uji t yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. T tabel dapat diketahui dengan mencari derajat kebebasan ($df = n - k - 1$) = $96 - 4 - 1 = 91$. Sehingga didapat nilai t tabel adalah 1,662. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a) Nilai t hitung pada variabel akuntabilitas (X1) sebesar 2,228. Nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,228 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,028 < 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana desa.
- b) Nilai t hitung pada variabel partisipasi masyarakat (X2) sebesar

-0,786. Nilai t hitung < t tabel yaitu $-0,786 < 1,662$, dan nilai signifikansi $0,434 > 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X2) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana desa.

- c) Nilai t hitung pada variabel transparansi (X3) sebesar 6,388. Nilai t hitung > t tabel yaitu $6,388 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X3) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana desa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu $2,228 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,028 < 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. Diterimanya hipotesis pertama memberikan makna bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas akan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik apabila dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari perencanaan yang diawali dengan musyawarah dengan masyarakat nagari, pelaksanaan yang dilakukan oleh PTPKN, penatausahaan yaitu pertanggungjawaban dari TPK kepada PTPKN, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pihak nagari kepada kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut harus diwujudkan sehingga pengelolaan

dana desa bisa mencapai hasil yang maksimal. Perangkat desa dalam mengelola dana desa harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku karena ketaatan perangkat desa merupakan cerminan atas kompetensi yang dimilikinya, kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa berperan dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat atas dana yang diperoleh.

Hasil ini juga sejalan dengan teori *stewardship* dimana para manajemen atau perangkat desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Pemerintah desa juga harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa berjalan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh P.Nugroho (2022) dan Alpendra.E (2021) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

4.4.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-0,786 < 1,662$, dan nilai signifikansi $0,434 > 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima, karena nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t tabel dan tidak

signifikan. Tidak diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa walaupun kurangnya partisipasi masyarakat tidak akan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena hampir disetiap kegiatan dana desa sudah di tunjuk tim pelaksana dan pekerja yang di beri upah.

Hasil ini juga sejalan dengan teori keagenan dimana masyarakat yang berperan sebagai principals dan pemerintahan desa yang berperan sebagai agents dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Pemerintah desa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya dan disini masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasinya dan akan dijalankan oleh pihak pengelola sumber daya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh K.Aprilya (2020) dan N.Indraswari (2021) yang menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa

4.4.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Transparansi (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $6,388 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. Diterimanya hipotesis ketiga memberikan makna bahwa semakin meningkatnya transparansi akan menjadikan pengelolaan

dana desa juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Dalam tahapan pengelolaan dana desa terdapat tahap pelaksanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh aparat desa yang berwenang mengelola, dalam perwujudan keterbukaan informasi maka setiap pelaksanaan kegiatan dana desa wajib dilengkapi dengan adanya keterbukaan informasi seperti pemasangan papan informasi kegiatan pada lokasi pembangunan dan didepan kantor wali nagari. Dengan adanya transparansi maka perwujudan tata pemerintah yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa dikatakan berhasil.

Hasil ini sejalan dengan teori stewardship seperti pada akuntabilitas dimana para manajemen atau perangkat desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Selain membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, pemerintah desa juga berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa secara terbuka, dan jujur, berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N.Ramadhani (2021) dan P.Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,228 > 1,662$.
2. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,434 lebih besar dari 0,1 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,786 < 1,662$.
3. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,388 > 1,662$.
4. Hasil Uji F menunjukkan variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini telah dibuktikan dengan F hitung $> F$ tabel dengan nilai $49,087 > 2,14$ dan nilai signifikan yang diperoleh adalah lebih kecil dari 0,1 yaitu 0,000.

5.2 Saran

1. Bagi Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, Tanah Datar diharapkan terus mempertahankan kedisiplinan dan kinerjanya yang baik dengan terus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara relevan dan lengkap, menyampaikan kepada publik mengenai informasi dengan jujur dan terbuka, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pertanggung jawaban, pelaksanaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan di setiap akhir periodenya. Para aparatur desa juga diharapkan bisa memanfaatkan akuntansi dengan basis syariah dengan berbagai prinsip seperti partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat variabel lain selain yang peneliti saat ini gunakan seperti pengawasan dana desa dan kepercayaan kepada pemerintah desa dikarenakan pengelolaan dana desa terutama di Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, Tanah Datar memiliki banyak faktor lain yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu, 2011.
- Alpendra, E. (2021) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhan Perak*, 2(2), 466-480.
- Ariningsih, Leni. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana)." *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen* (2021): 19.
- Atiningsih, Suci, and Aulia Cahya Ningtyas. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10, no. 1 (2019).
- Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, and Budy P. Resosudarmo. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Azkiya, Vika. "ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa Pada 2021." *Databoks*. Last modified 2022. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor \(2021\)&text=Indonesia Corruption Watch \(ICW\) menemukan, kerugian negara sebesar Rp233](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2021)&text=Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan, kerugian negara sebesar Rp233).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, and Lembaga Administrasi Negara. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Fauzani, Faza Meila, Atiek Sri Purwati, and Sudjono. "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga." *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8, no. 1 (2018): 5.
- Febriyanti, Suci, and Halmawati Halmawati. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2331-2347.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP, 2009.

- Gunawan, Totok, Sukwardjono, Mas Sukoco, Agus Sudarsono, and Soewadi. *Fakta Dan Konsep Geografi*. Jakarta: Inter Plus, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Jubaedah, Edah, Joni Dawud, Deddy Mulyadi, Nugraha, Haris Faozan, and Putri Wulandari. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I - LAN, 2008.
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 213–221.
- Kantor Wali Nagari Sumpur. *Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Nagari Sumpur*, n.d.
- Khairani. "Perbedaan Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Tanah Datar." *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019).
- Langkun, Pretty A., Ventje Ilat, and Rudy J. Pusung. "Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 54–57.
- Lupiyoadi, Rambat, and Ridho Bramulya Ikhsan. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Mahayani, Ni Luh Ayu. "Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (2017): 129.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2014.
- Muddatstsir, Uun Dwi Al, Dessy Noor Farida, and Early Ridho Kismawadi. "Praktik Akuntabilitas Masjid : Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya" 9 (2018): 207–231.

- Muthmainnah, Z., Suryanda, A., Komala, R., Aprilia, K., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Penerapan 'Papadak' Terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 65-75.
- Novitasari, Alfitiana Dyah, and Priyatno Harsasto. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>.
- Nugroho, Prihasantyo Siswo, Panca Wahyuningsih, and Siti Alliyah. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 01 (2022).
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).," 2010.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.
- Priyanto, Duwi. *Analisis Korelasi Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Purwanti, Umi. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90.
- Putra, I Made Yoga Darma, and Ni Ketut Rasmini. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 1 (2019): 132.
- Putri, Ade Ayu Anggreni, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2021): 263.
- Ramadhani, Nada Salsabila, and Anik Yuliati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021).
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Rismawati, Tika. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen

- Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Cet 1. Jakarta: SinarGrafika, 2007.
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Samampouw, Monique. *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif*. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Soemarwoto, Suharyono. *Catatan Penting Ke-Indonesia -an Kita Jilid 2*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistik Dengan Aplikasi SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. Jambi: Syariah Press, 2014.
- Tim Visi Yustisia. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Zulsrianti, Elmi. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.” *Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*. IAIN Batusangkar, 2019.
- Kantor Wali Nagari Sumpur*, 2022.
- Peraturan Lengkap Desa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”**. Dengan itu, di sela-sela kesibukan saudara, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i membantu Saya dalam mengisi kuesioner ini. Atas kesediaannya Saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

- a. Petani
- b. PNS
- c. Wiraswasta
- d. Lainnya :

Petunjuk Pengisian

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Pada masing-masing pernyataan terdapat lima alternatif jawaban beserta skor masing-masing sebagai berikut :
 - a. Sangat Setuju (SS) : 5
 - b. Setuju (S) : 4
 - c. Kurang Setuju (KS) : 3
 - d. Tidak Setuju (TS) : 2
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

1. Akuntabilitas (X1)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan					
1.	Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.					
	Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa					
2.	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap waktu.					
	Adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa					

3.	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa					
4.	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
5.	Kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa.					

2. Partisipasi Masyarakat (X2)

No	Pernyataan	SS	S	N	KS	STS
	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa					
1.	Saya merasa masyarakat Nagari Sumpur selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan dana desa.					
	Mengusulkan rencana anggaran dan melaksanakan program					
2.	Saya merasa masyarakat Nagari Sumpur bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
3.	Saya bersedia menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari					

	program pengelolaan dana desa dengan baik.					
	Terlibat mengawasi dan melaporkan					
4.	Saya merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.					
	Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran					
5.	Saya merasa masyarakat Nagari Sumpur bebas dalam menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan kepada pengelola dana desa.					

3. Transparansi (X3)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen					
1.	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa.					
	Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi					
2.	Adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi rencana dan pengalokasian dana desa.					
3.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					

	Adanya keterbukaan proses					
4.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					
	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi					
5.	Saya merasa transparansi pengelolaan dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat.					

4. Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Tahap perencanaan					
1.	Perencanaan dana desa disampaikan dengan baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada.					
	Tahap pelaksanaan					
2.	Penggunaan dana desa digunakan dengan baik sesuai dengan program yang telah dibuat dalam rencana program kegiatan.					
	Tahap penatausahaan					
3.	Penatausahaan dana desa memenuhi standar dalam peraturan undang-undang tentang desa.					
	Tahap pelaporan					

4.	Adanya laporan mengenai rincian penggunaan dana desa kepada masyarakat.					
	Tahap pertanggungjawaban					
5.	Seluruh masyarakat diberi tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan dana desa.					

Lampiran 2

Daftar Karakteristik Responden

NO	RESPONDEN	JENIS KELAMIN	UMUR	PEKERJAAN
JORONG NAGARI				
1	Erizaldi	Laki-laki	46 Tahun	Wiraswasta
2	Novendri	Laki-laki	48 Tahun	Karyawan
3	Hengki Irawan	Laki-laki	44 Tahun	Karyawan
4	Rifni Wati	Perempuan	70 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5	Nasri	Laki-laki	73 Tahun	Petani
6	Rahmad Hidayat	Laki-laki	36 Tahun	Karyawan
7	Leni Rosandi	Perempuan	42 Tahun	PNS
8	Agus Rizal	Laki-laki	28 Tahun	Nelayan
9	Rahmad Fazri	Laki-laki	29 Tahun	Nelayan
10	Syafrinal Susanto	Laki-laki	42 Tahun	Nelayan
11	Daffa Iswanda	Laki-laki	26 Tahun	Nelayan
12	Eka Nirwati	Perempuan	44 Tahun	Ibu Rumah Tangga
13	Joni Zainal	Laki-laki	51 Tahun	Nelayan
JORONG SEBERTA				
1	Yeni	Perempuan	33 Tahun	PNS
2	Doni Usman	Laki-laki	49 Tahun	Wiraswasta
3	Endang	Perempuan	27 Tahun	Ibu Rumah Tangga
4	Muhammad Fadhil	Laki-laki	23 Tahun	Wiraswasta
5	Rismawati	Perempuan	54 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6	Siti Sovia	Perempuan	39 Tahun	Ibu Rumah Tangga
7	Indriana Dewi	Perempuan	23 Tahun	Mahasiswa
8	Fuji Kusriani	Perempuan	48 Tahun	Ibu Rumah Tangga
9	Irwandi	Laki-laki	52 Tahun	Wiraswasta
10	Devi Yanti	Perempuan	48 Tahun	Ibu Rumah Tangga
11	Novri Leni	Perempuan	34 Tahun	Ibu Rumah Tangga
12	Harisman	Laki-laki	40 Tahun	Petani
13	Endang Oktaviani	Perempuan	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
14	Jefri Masri	Laki-laki	51 Tahun	PNS
15	Hendra	Laki-laki	43 Tahun	Wiraswasta
16	Dwi	Perempuan	26 Tahun	Honorar
17	Egi Romanza	Laki-laki	28 Tahun	Nelayan

18	Andriaz Saputra	Laki-laki	27 Tahun	Buruh Harian Lepas
19	Deri Yanto	Laki-laki	30 Tahun	Petani
20	Asrijal	Laki-laki	35 Tahun	Petani
21	Herryansyah	Laki-laki	23 Tahun	Wiraswasta
22	Rey	Laki-laki	26 Tahun	Petani
23	Al Isra	Laki-laki	38 Tahun	Petani
24	Zubir	Laki-laki	44 Tahun	Petani
25	Novia Linda	Perempuan	43 Tahun	Ibu Rumah Tangga
26	Novri Edi	Laki-laki	55 Tahun	Wiraswasta
27	Wahyu Oktavian	Laki-laki	18 Tahun	Mahasiswa
JORONG SUDUT				
1	Muhammad Gandhi	Laki-laki	19 Tahun	Mahasiswa
2	Ade Pratama	Laki-laki	25 Tahun	Wiraswasta
3	Heri Yadi	Laki-laki	43 Tahun	Wiraswasta
4	Eko Wahyudi	Laki-laki	40 Tahun	Petani
5	Herman	Laki-laki	49 Tahun	Wiraswasta
6	Arizal	Laki-laki	43 Tahun	Wiraswasta
7	Armadoni	Laki-laki	40 Tahun	Wiraswasta
8	Darmilis	Laki-laki	55 Tahun	Nelayan
9	Venny Novita Sari	Perempuan	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
10	Mal Delvi Yanti	Perempuan	20 Tahun	Wiraswasta
11	Rosneti	Perempuan	59 Tahun	Petani
12	Muhammad Effendi	Laki-laki	25 Tahun	Wiraswasta
13	Friska Sari	Perempuan	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga
14	Dea Desriani	Perempuan	19 Tahun	Mahasiswa
15	Ivo Dayasha	Perempuan	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
16	Joni Firdaus	Laki-laki	33 Tahun	Petani
17	Syahril	Laki-laki	56 Tahun	Petani
18	Muhammad Hidayatullah	Laki-laki	19 Tahun	Mahasiswa
19	Syafril	Laki-laki	56 Tahun	Petani
20	Anizar	Laki-laki	52 Tahun	Petani
21	Eri Kiswanto	Laki-laki	33 Tahun	Nelayan
22	Joni Asrul	Laki-laki	60 Tahun	Petani
23	Jhon Efendi	Laki-laki	46 Tahun	Wiraswasta
24	Elfi Rahmi	Perempuan	51 Tahun	Ibu Rumah Tangga
25	Yogi Indrawan	Laki-laki	28 Tahun	Wiraswasta
26	Panji Iman Darmawan	Laki-laki	24 Tahun	Mahasiswa

JORONG KUBU GADANG				
1	Febby Elfrina	Perempuan	27 Tahun	Ibu Rumah Tangga
2	Elva Susanti	Perempuan	51 Tahun	Ibu Rumah Tangga
3	Usman	Laki-laki	50 Tahun	Wiraswasta
4	Muhammad Hafis	Laki-laki	17 Tahun	Pelajar
5	Eky Rahmawita	Perempuan	39 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6	Irma Novita	Perempuan	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga
7	Syafril Efendi	Laki-laki	58 Tahun	Wiraswasta
8	Yesnita	Perempuan	59 Tahun	PNS
9	Ardila Sari	Perempuan	32 Tahun	Honorar
10	Deni Afroni	Laki-laki	42 Tahun	Ibu Rumah Tangga
11	Nurhayati	Perempuan	54 Tahun	Ibu Rumah Tangga
12	Aprina Wiranti	Perempuan	22 Tahun	Ibu Rumah Tangga
13	Sofianita	Perempuan	56 Tahun	Ibu Rumah Tangga
JORONG BATU BERAGUNG				
1	Ardi Hamdayani	Laki-laki	24 Tahun	Nelayan
2	Givahri	Laki-laki	20 Tahun	Wiraswasta
3	Armen	Laki-laki	33 Tahun	Petani
4	Ridhonal Febrianto	Laki-laki	28 Tahun	Nelayan
5	Whytra Dasril	Laki-laki	26 Tahun	Buruh Harian Lepas
6	Roma Nadi	Laki-laki	22 Tahun	Wiraswasta
7	Agus Saini	Laki-laki	63 Tahun	Wiraswasta
8	Dasril	Laki-laki	63 Tahun	Wiraswasta
9	Yudri Noventri	Laki-laki	27 Tahun	Wiraswasta
10	Irwanto	Laki-laki	39 Tahun	Wiraswasta
11	Noviardi	Laki-laki	42 Tahun	Wiraswasta
12	Putrui Mayasari	Perempuan	27 Tahun	Wiraswasta
13	Rifnati	Perempuan	55 Tahun	Ibu Rumah Tangga
14	Ucok Ramadhan	Laki-laki	36 Tahun	Wiraswasta
15	Ferdian	Laki-laki	35 Tahun	Wiraswasta
16	Jon Hardi	Laki-laki	47 Tahun	Petani
17	Marlinda	Perempuan	42 Tahun	Ibu Rumah Tangga

Lampiran 3

Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Akuntabilitas

AKUNTABILITAS					
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
4	5	5	5	5	24
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	5	23
4	4	5	5	4	22
4	5	4	5	4	22
5	5	5	5	4	24
4	4	5	5	4	22
4	4	5	5	4	22
4	4	5	4	4	21
5	5	4	5	5	24
4	5	5	5	4	23
5	5	5	4	5	24
5	5	5	4	5	24
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
4	4	4	5	5	22
4	4	5	4	5	22
4	3	4	4	3	18
3	3	4	4	4	18
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
4	4	5	4	5	22
5	4	5	4	4	22
5	5	5	5	4	24
4	4	5	4	5	22
4	3	3	3	4	17
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	4	4	4	5	22

4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	3	5	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	3	3	4	5	19
4	4	5	4	5	22
4	5	4	5	4	22
4	5	3	4	4	20
4	4	4	4	3	19
4	2	3	4	4	17
4	3	4	3	4	18
3	3	3	4	4	17
4	4	3	4	4	19
5	4	4	4	5	22
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
2	3	2	4	4	15
4	4	5	5	4	22
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	4	24
3	4	4	4	5	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	5	24
4	4	4	5	5	22
4	4	3	4	4	19
3	2	3	2	2	12
3	3	3	4	4	17
4	5	5	5	4	23
4	5	5	5	4	23
5	5	5	4	4	23
4	4	5	5	5	23
4	4	5	4	5	22
4	5	5	4	4	22
4	5	5	4	5	23

4	4	5	5	4	22
4	4	5	4	3	20
5	4	4	3	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	4	4	5	5	22
5	4	3	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
2	3	3	4	4	16
4	3	4	4	4	19
4	4	5	4	5	22
5	4	5	4	5	23
4	3	4	3	4	18
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	21
5	5	4	4	4	22
4	3	5	4	4	20
2	2	3	4	3	14
4	4	3	5	4	20
4	4	4	4	4	20
4	3	5	5	4	21
4	4	5	4	3	20
4	4	5	4	3	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20

Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Partisipasi Masyarakat

PARTISIPASI MASYARAKAT					
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
4	5	4	4	5	22
4	4	5	5	4	22
4	5	4	4	5	22
5	5	4	5	5	24
5	5	4	5	5	24
4	5	5	4	5	23
5	5	4	5	4	23
5	5	5	4	4	23
4	5	4	4	5	22
4	5	4	4	5	22
5	4	5	5	4	23
5	4	4	5	4	22
4	4	4	5	4	21
3	4	3	4	4	18
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	3	5	4	20
4	5	4	5	5	23
4	4	2	4	4	18
3	4	3	4	4	18
5	4	4	4	5	22
5	5	4	5	5	24
4	5	3	4	5	21
4	5	4	5	5	23
4	5	5	5	5	24
5	4	4	5	4	22
4	3	3	3	4	17
4	5	2	4	4	19
2	3	3	2	2	12
5	5	4	4	5	23
2	5	4	4	5	20
5	4	3	4	5	21

2	4	4	5	3	18
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
5	4	3	5	5	22
4	4	4	4	5	21
5	5	5	4	4	23
4	4	4	5	3	20
4	5	4	4	3	20
4	4	2	5	5	20
4	4	4	5	4	21
3	4	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	2	2	4	2	14
5	5	5	5	5	25
2	5	4	5	5	21
5	4	5	5	5	24
4	5	5	4	5	23
4	5	4	4	5	22
4	5	3	5	4	21
5	5	4	4	5	23
5	5	4	4	5	23
4	5	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	5	22
2	3	3	2	3	13
3	4	4	3	4	18
4	5	5	4	5	23
5	4	4	5	5	23
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	4	22
5	4	5	5	5	24
5	4	5	5	4	23
5	5	4	4	5	23
5	5	4	4	5	23
5	4	5	4	4	22

2	4	4	2	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	23
5	5	3	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
2	2	3	3	3	13
4	4	2	4	2	16
4	4	2	3	4	17
5	5	4	5	5	24
3	4	3	3	3	16
4	5	4	5	5	23
4	5	4	4	5	22
4	4	3	2	5	18
4	5	5	5	4	23
4	5	5	4	5	23
4	5	4	4	4	21
2	4	3	3	3	15
4	4	4	4	5	21
3	4	3	4	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	5	20
4	4	4	3	5	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22

Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Transparansi

TRANSPARANSI					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total
4	5	5	4	4	22
5	4	4	5	5	23
4	4	5	5	4	22
4	5	4	5	5	23
4	5	5	4	4	22
4	5	4	5	5	23
5	5	4	5	4	23
5	5	4	5	5	24
5	5	5	4	5	24
5	5	4	4	5	23
4	4	5	5	5	23
4	4	5	4	4	21
5	5	4	5	5	24
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	3	19
4	4	5	4	5	22
3	4	4	4	4	19
5	3	4	3	5	20
5	4	4	4	5	22
5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	5	23
3	3	3	4	4	17
5	4	5	5	5	24
3	3	3	3	3	15
5	4	4	4	5	22
3	3	3	2	5	16
4	4	5	4	4	21

4	5	5	3	3	20
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	5	22
5	5	5	4	5	24
4	4	5	5	5	23
4	5	4	4	4	21
5	4	4	5	5	23
5	4	5	3	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	5	4	21
3	3	4	4	4	18
4	4	4	3	4	19
3	4	4	4	4	19
4	4	4	3	5	20
4	3	3	4	3	17
5	5	5	4	5	24
3	4	3	3	2	15
4	4	5	5	4	22
5	5	5	4	3	22
4	4	4	5	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23
4	4	4	5	5	22
4	3	3	4	4	18
3	3	3	4	4	17
4	4	4	3	4	19
5	5	5	4	5	24
5	4	5	5	5	24
5	5	5	4	4	23
4	4	5	4	5	22
4	5	4	5	5	23
4	5	5	5	5	24
5	5	4	4	5	23
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20

3	3	3	5	4	18
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	4	23
4	5	5	5	4	23
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
2	3	2	2	2	11
3	3	3	2	2	13
4	4	4	5	4	21
4	5	4	5	3	21
2	3	2	3	4	14
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	5	4	4	4	21
4	4	5	5	4	22
2	4	3	5	4	18
4	4	4	5	4	21
3	4	4	4	4	19
3	4	4	4	4	19
3	4	4	3	4	18
3	4	4	5	4	20
4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	5	22

Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Pengelolaan Dana Desa

PENGELOLAAN DANA DESA					
1	2	3	4	5	Total
5	5	4	5	4	23
5	4	4	5	5	23
5	5	4	5	4	23
4	5	5	4	5	23
5	5	4	5	4	23
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	4	23
4	4	5	4	5	22
5	5	4	4	5	23
5	5	4	5	5	24
4	4	5	5	5	23
3	4	4	4	4	19
5	4	5	4	4	22
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	3	18
4	3	4	3	3	17
4	4	4	5	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
4	3	4	4	5	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	5	24
4	3	4	3	3	17
4	4	5	4	5	22
3	4	4	3	3	17
4	5	4	4	5	22

5	5	4	5	5	24
3	4	4	3	4	18
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	4	3	22
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	4	22
4	5	4	5	3	21
4	3	5	4	4	20
5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	4	18
4	5	4	4	4	21
4	4	4	3	3	18
5	5	5	5	5	25
2	3	4	2	2	13
3	4	5	3	4	19
4	3	4	4	5	20
4	3	5	4	5	21
4	5	4	5	4	22
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	3	18
4	2	3	4	4	17
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	4	23
5	5	4	5	5	24
5	4	4	5	4	22
4	5	5	4	5	23
4	5	5	5	4	23
4	4	5	4	5	22
5	5	4	5	4	23
5	4	5	4	5	23
4	4	4	4	5	21

4	4	5	3	5	21
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	5	24
5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
2	3	3	4	4	16
4	3	2	2	2	13
4	4	4	3	4	19
5	5	5	4	5	24
3	4	4	3	3	17
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	22
4	5	5	5	4	23
5	5	4	5	5	24
4	3	4	4	3	18
4	5	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	4	18
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	5	24
5	5	4	5	5	24

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas

Akuntabilitas

Correlations

	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	Total
X1_1 Pearson Correlation	1	.622**	.520**	.328**	.376**	.755**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000
N	96	96	96	96	96	96
X1_2 Pearson Correlation	.622**	1	.584**	.568**	.412**	.853**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	96	96	96	96	96	96
X1_3 Pearson Correlation	.520**	.584**	1	.460**	.316**	.781**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000
N	96	96	96	96	96	96
X1_4 Pearson Correlation	.328**	.568**	.460**	1	.368**	.716**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
N	96	96	96	96	96	96
X1_5 Pearson Correlation	.376**	.412**	.316**	.368**	1	.649**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000		.000
N	96	96	96	96	96	96
Total Pearson Correlation	.755**	.853**	.781**	.716**	.649**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	96	96	96	96	96	96

Hasil Uji Validitas

Partisipasi Masyarakat

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	Total
X2_1	Pearson Correlation	1	.368**	.327**	.516**	.482**	.750**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_2	Pearson Correlation	.368**	1	.442**	.371**	.628**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_3	Pearson Correlation	.327**	.442**	1	.362**	.392**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_4	Pearson Correlation	.516**	.371**	.362**	1	.327**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_5	Pearson Correlation	.482**	.628**	.392**	.327**	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.750**	.743**	.696**	.707**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

Hasil Uji Validitas

Transparansi

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Total
X3_1	Pearson Correlation	1	.583**	.594**	.354**	.552**	.817**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3_2	Pearson Correlation	.583**	1	.596**	.432**	.328**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3_3	Pearson Correlation	.594**	.596**	1	.411**	.392**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3_4	Pearson Correlation	.354**	.432**	.411**	1	.427**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3_5	Pearson Correlation	.552**	.328**	.392**	.427**	1	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.817**	.763**	.786**	.701**	.719**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

Hasil Uji Validitas

Pengelolaan Dana Desa

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Total
Y_1	Pearson Correlation	1	.606**	.325**	.633**	.477**	.801**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y_2	Pearson Correlation	.606**	1	.409**	.626**	.390**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y_3	Pearson Correlation	.325**	.409**	1	.341**	.423**	.625**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.001	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y_4	Pearson Correlation	.633**	.626**	.341**	1	.563**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y_5	Pearson Correlation	.477**	.390**	.423**	.563**	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.801**	.796**	.625**	.843**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

Lampiran 5

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	5

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67418292
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.050
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Lampiran 7

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	.398	2.515
	Partisipasi Masyarakat	.382	2.616
	Transparansi	.384	2.605

Lampiran 8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.654	.939		1.762	.081
Akuntabilitas	.038	.066	.094	.572	.569
Partisipasi Masyarakat	-.015	.063	-.040	-.240	.811
Transparansi	-.040	.065	-.104	-.622	.535

Lampiran 9

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.346	1.494		2.909	.005
	Akuntabilitas	.235	.106	.228	2.228	.028
	Partisipasi Masyarakat	-.079	.100	-.082	-.786	.434
	Transparansi	.657	.103	.667	6.388	.000

Lampiran 10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.615	.603	1.701

Lampiran 11

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	426.215	3	142.072	49.087	.000 ^b
	Residual	266.274	92	2.894		
	Total	692.490	95			

Lampiran 12

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.346	1.494		2.909	.005
Akuntabilitas	.235	.106	.228	2.228	.028
Partisipasi Masyarakat	-.079	.100	-.082	-.786	.434
Transparansi	.657	.103	.667	6.388	.000

Lampiran 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahrul Rizky

Tempat, Tanggal Lahir : Padang Panjang, 10 Juni 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jorong Batu Beragung, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Nama Ayah : Nasri

Pekerjaan Ayah : Petani

Nama Ibu : Rifni Wati

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

No. Handphone : 082306979204

Email : fahrulrizky98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK (2004-2005) : TK Islam Sumpur
2. SD (2005-2011) : SDN 09 Sumpur
3. SMP (2011-2014) : MTsN 4 Tanah Datar
4. SMA (2015-2018) : MAN 3 Padang Panjang

Lampiran 14

Dokumentasi Penelitian

